

# **EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 25 TAHUN 2010 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

Oleh: Alpindo Rusmin

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIPOL. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari kebijakan Perwal No. 25 Tahun 2010 Tentang Kendaraan Tidak Bermotor Dari tahun 2011 sampai 2016 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sehingga dapat memberikan saran berupa solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja atau peluang dari kebijakan yang ada serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah terjadi untuk kedepannya tidak terjadi kedua kalinya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, hasil Penelitian ini ditunjukkan bahwa Kebijakan-kebijakan Kendaraan tidak bermotor sudah dilaksanakan dengan semestinya sesuai yang ada di Perwal No. 25 Tahun 2010. Tahapan-tahapan kebijakan yang dilaksanakan atau di pleningkan semua beracuan kepada Perwal No. 25 Tahun 2010 tetapi hasil dari kebijakan seringkali mempunyai kekurangan atau kelebihan yang harus ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Yang nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal, serta memberi dampak terhadap kemajuan pariwisata didalam Tranportasi Tradisional Diindonesia dan didunia.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Kendaraan tidak Bermotor, Kemajuan Pariwisata Transportasi

### **A. Pendahuluan**

Yogyakarta merupakan kota budaya dan berwisata, selain itu juga dikenal sebagai kota Pendidikan. Kota Yogyakarta juga melakukan pemenahan lalu lintas yang di

maksud pada Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran Strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas Nasional sebagai Bagian dari upaya memajukan Kesejahteraan Umum sebagai mana yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hal yang harus menjadi Prioritas saat ini adalah jalanan-jalanan di Yogyakarta yang semakin padat dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi mereka dari kendaraan bermotor di jalan dan mendorong masyarakat lain untuk menggunakan sepeda. Pada kenyataannya, ruang yang sudah dibagi tersebut masih dikuasai oleh pengguna kendaraan bermotor.

Yang dimaksud Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, diantaranya adalah sepeda, sepeda tandem, becak, kereta yang ditarik hewan, kereta dorong atau tarik. Kendaraan tidak bermotor wajib mengikuti aturan lalulintas yang sudah diterapkan dan mengikuti jalur atau jalan yang sudah dibuat atau ditetapkan, yang merupakan jalur sebelah kiri jalan yang sudah dibuat atau ditandai dibahu jalan, pemerintah daerah atau kota melakukan koordinasi atau pembinaan untuk menata tertipkan pengendara kendaraan tidak bermotor. Jalur khusus sepeda sudah dibangun sejak 2009 yang merupakan salah satu fasilitas yang diterapkan pemerintah kota untuk kenyamanan pengguna sepeda, begitu juga pemerintah membangun penggal jalur sepeda sebanyak 34 sesuai yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta, Pemilihan penggal jalan tersebut mengacu pada fungsi utama pembuatan jalur khusus sepeda yaitu memberikan kenyamanan pada pengguna sepeda di Yogyakarta.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota kota Yogyakarta No. 25 Tahun 2010 Tentang Peraturan kendaraan Tidak Bermotor 2011-2016 ?
2. Bagaimana Keabsahan Perwal No. 25 tahun 2010 Tentang Kendaraan Tidak Bermotor 2011-2016 ?

3. Apa saja yang Mempengaruhi Kelemaahaan Perwal No. 25 Tahun 2010 Tentang Kendaraan Tiidak Bermotor 2011-2016 ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis keabsahan Perwal No 25 Tahun 2010 tentang kendaraan tidak bermotor
2. Mengetahui Perwal No 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan tidak Bermotor, Apakah sudah dilaksanakan dengan seharusnya.
3. Mengetahui Kelemahan kebijakann yang sudah di jalankan sesuai dengan Peaturan Walikkota Yogyakarta No. 25 tahun 2010 Tentang Kenaraan Tidak bermotor

#### D. Landasan Teori

1. Evaluasi Kebijakan

Salah satu mekanisme untuk mengawasi sebuah kebijakan sering disebut Evaluasi, evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kebijakan public sejak Formulasi hingga Implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut karena memang kaidah tersebut tidak dapat ditolak, sama seperti kehidupan kita sehari-hari, bahwa tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan Intervensi. Oleh karena itu, Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan atau action intervensi itu sendiri.

Jenis evaluasi lingkungan kebijakan public sedikit mendapatkan perhatian, baik dari praktisi maupun akademis evaluasi kebijakan public. Kenyataan ini harus diakui karena sekuat apa pun pengaruh lingkungan merupakan factor yang berbeda diluar kendali dari kebijakan public, karena itu acapkali lingkungan kaluar dari evaluasi kebijakan public. Namun demikian, perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan

kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, namun dukungan lingkungan. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220).

Sedangkan menurut pengertian istilah “Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009). Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,” Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan public merupakan muara akhir dari seluruh proses penyelenggaraan system pemerintahan dan administrasi public. Kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan kualitas hidup merupakan indicator utama dari terjismannya pelayanan public yang baik, dan sangat berkaitan dengan peran atau tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara karena Negara memperoleh mandate dan kewajiban didalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat. Didalam konteks Indonesia, peningkatan pelayanan public menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar kesejahteraan masyarakat semakin membaik, Perkembangan Pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat lumrah dan wajib bagi para pejabat public. Berbagai terobosan dan bahkan inovasi pun gencar dilakukan demi untuk dan atas nama pelayanan kepada public.

Inovasi Pelayanan Publik disuatu wilayah administrative bias dengan mudah direplikasi untuk wilayah yang lain, namun meskipun demikian ternyata masih banyak yang ternyata lepas dari perhatian yaitu bagaimana ketika permasalahan pelayanan public tersebut menyangkut masalah di perbatasan dengan daerah administrative lain yang bertetangga yang sering didefinisikan sebagai “*grey area*’ .

Di Yogyakarta pelayan public sangat meningkat tajam khususnya dalam melayani dan dilayani khususnya pelayanan di berbagai fasilitas-fasilitas masyarakat yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat kota Yogyakarta, setiap golongan masyarakat harus mendapatkan hak yang sama untuk nikmati pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan, dan masyarakat juga harus diberikan peluang untuk berkontribusi dalam peningkatan pelayanan, baik dalam bentuk penyampaian aspirasi langsung ataupun tidak langsung yang fasilitasnya semestinya disediakan oleh penyedia layanan secara terbuka dan transparan.

Dalam konteks tersebut penyedia layanan tidak boleh anti kritik namun justru harus menerima segala bentuk masukan dan aspirasi dari masyarakat pengguna dalam rangka melakukan inovasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung seperti bangunan fisik, system dan prosedur, aturan main, sumber daya manusia yang berkualitas dan pelayan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis atau Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yang merupakan langkah menitikberatkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penelitian. penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan atau dilakukan secara sistematis, factual, akurat yang sesuai dengan fakta-fakta, yang berhubungan dengan penelitian. Istilah lain juga muncul untuk

menggambarkan deskriptif merupakan langkah awal dari jenis jenis metode penelitian, dan juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang dilakukan adalah jenis primer yang merupakan pengambilan data secara langsung yang dilakukan dengan wawancara. Sumber Data yang akan dilakukan sesuai dengan penelitian yaitu survei, survey tersebut akan dilakukan ditempat-tempat yang memiliki jalur khusus pengendara sepeda.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil di Kota Yogyakarta yang Mempunyai Jalur Khusus Kendaraan tidak bermotor serta tempat-tempat yang mempunyai fasilitas kendaraan tidak bermotor.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun metode penelitian, langkah akhirnya adalah mengumpulkan Sumber data, sumber data tersebut dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder yang akan diolah secara baik. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penelitian dalam mendapatkan informasi atau fakta-fakta lapangan untuk mendukung sebuah penelitian. Salah satunya yaitu Wawancara, Observasi, Teknik study pustaka

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 25 Tahun 2010 Tentang Peraturan Kendaraan Tidak Bermotor 2011-2016

Didalam Perwal No. 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan tidak Bermotor member dampak yang cukup besar terhadap kebijakan alat Transfortasi yang ada di Kota Yogyakarta, Pemerlakuan Kabijakan tersebut yang diatas sudah disahkan oleh Pemerintah Kota sejak diperlakukan Peraturan tersebut, yang mana hasil kebijakan tersebut dapat evaluasi baik pada saat pelaksanaan atau pun sedah pelaksanaan kebijakan. persamaan dengan Implementasi Kebijakan didalam kegiatan penilaian yang akan dilakukan oleh Dinas perhubungan Kota Yogyakarta didalam melakukan atau memilih sebuah kebijakan yang sudah atu akan dilakukan.

- a. Implementasi Strategi Kebijakan Kendaraan tidak Bermotor
- b. Pengorganisasian Pelaksanaan kebijakan Kendaraan tidak Bermotor
- c. Pengerakan dan Kepemimpinan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- d. Pengendalian kebijakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Semua tahapan tersebut untuk melaksanakan implementasi kebijakan, hasil dari haltersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tentang KTB yang berpedoman Kepada Perwal No. 25 Tahun 2010, kebijakan dijalankan dengan semestinya tetapi setiap kebijakan pasti adanya kekurangan dan kelebihan. Bahwa tidak semua kebijakan didalam Perwal dapat dijalankan dengan semestinya semua dikarnakan bawah adanya suatu konsi daman kebijakan tersebut belum cocok jika diimplementasikan di kota Yogyakarta, kurangnya SDM dan minimnya pengawasan dan koorninasi antara Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Masyarakat. dan Dinas Perhubungan masih terus menerus mencari atau memilah kebijakan apa saja yang cocok untuk kedepannya khususnya KTB yang nantinya akan menjadi Transportasi Pariwisata Jogjakarta dan Indonesia.

## G. Penutup

## 1. Kesimpulan

- a. Bahwa pengguna Kendaraan tidak Bermotor difasilitasi sesuai dengan Keadaan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta Khususnya kebijakan-Kebijakan Kendaran tidak Bermotor, dan Perwal No 25 Tahun 2010 Sebagai acuan Untuk memilih Kebijakan-Kebijakan yang sesuai dengan Kondisi Real dilapangan. Dalam mengukur keberhasilan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta baik Output atau Outcome yang direncanakan.
- b. Dari hasil penelitian keabsahan Perwal No. 25 tahun 2010 tentang Kendaraan tidak Bermotor dari tahun 2011 sampai 2016 sudah sah di mata hukum yang merupakan komponen yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pedoman untuk menjalan kn atupun penindakan dilampnn khususnya kendaraan tidak Bermotor, tetapi peraturan Hukum tersebut tidak di Implementasikan dengan seharusnya, padahal keabsahan Perwal tersebut sudah disahkan dari tahun pembuatan Perwal tersebut.
- c. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pastinya memiliki kelemahan yang sangat berdampak bagi pengguna KTB, tetapi dari kelemahan tersebut menjadi acuan kedepannya untuk Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta supaya Tidak Berdampak yang sama dengan hal yang terjadi sebelumnya, contohnya kelemahan perwal tersebut kurangnya pengawasan dan kesadaran dan haus diperbaharui stiap perkembangan zaman karna teknologi dan inovasi selalu berkembang, supaya Perwal tersebut dapat dijalankan dengan keadaan yang ada dilapangan.

Dengan peningkatan-peningkatan kebijakan seharusnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta berhasil baik dari segi Pelayanan-Pelayanan yang dibutuhkan khususnya untuk Kendaran tidak Bermotor. tapi dari segi Fasilitas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta perlu pembenahan jika ingin meningkatkan struktur Pembangunan yang Modern untuk Kendaraan tidak Bermotor,



sesuai dengan standar nasional atau pun Internasional yang sebagian dampaknya akan menariknya lagi parawisatawan yang ingin ke Yogyakarta untuk merasakan Kendaran tidak bermotor Tradisional maupun Modern sebagai acuan utama bagi kota-kota lainnya.

## 2. Saran

- a. Perlunya sosialisasi semaksimal mungkin dari setiap jenis pengguna Kendaran tidak Bermotor, supaya bisa menyerapkan Aspirasi-Aspirasi dari setiap jenis-jenis KTB untuk menentukan kebijakan yang mana yang lebih diutamakan dan lebih tepat.
- b. Meningkatkan Koordinasi dan Informasi yang disampaikan oleh petugas-petugas yang akan menjalankan Kebijakan dilapangan
- c. Perlunya saling kerjasama antara Dinas atau Badan yang lain untuk meningkatkan eksistensi dari kebijakan dan saling menghubungkan satu sama lain supaya tidak menitik beratkan Dinas atau Badan satu sama lainnya.
- d. Melakuakan kebijakan kendaran tidak Bermotor sebagai salah satu kebijakan utama di Dinas Pehubungan Kota Yogyakarta, supaya nantinya akan memaksimalkan lagi kebijakan-Kebijakan yang akan di Jalankan.
- e. Perlunya Anggaran Khusus untuk Kendaran tidak Bermotor supaya dapat tersalurkan dengan Maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal, Said. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Dwijowijoto, Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Impementasi, dan*

*Evaluasi*). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Margasarina, Sri & Nursam M. 2010. *Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*.

Yogyakarta: Ombak.

Nurmandi, Achamad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT. Sinergi Visi Utama.

Patriajati, Rosaria MM. 2009. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (No. 22 Tahun*

*2009)*. Jakarta: Visimedia.

Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Public dan pengelolaan Infrastruktur*

*Perkotaan*. Yogyakarta: Sinergi Publishing.

Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Usmara, A. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.